

**Jakarta, 27 Desember 2012.** Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan transparansi kinerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, pada kesempatan hari ini kami menyampaikan capaian kinerja selama tahun 2012:

## Roadmap KPK

Pada 2012 KPK berhasil merumuskan peta jalan (roadmap) pemberantasan korupsi 2011-2023. Roadmap dibutuhkan untuk menentukan arah, target dan fokus serta langkah-langkah sistematis untuk memberantas korupsi yang sudah demikian kompleks dan mengakar. Secara garis besar ada beberapa hal penting dalam roadmap KPK, yakni national interest, yaitu yang menjadi kepentingan publik secara nasional; penanganan grand corruption; sistem integritas nasional; dan fraud control system.

Dari beberapa hal tersebut, dibuat turunannya sebagai acuan rencana kerja KPK. Antara lain yang termasuk national interest adalah ketahanan pangan plus (pertanian, perikanan, kehutanan); ketahanan energi/sumber daya alam (SDA); dan revenue, yaitu sektor penerimaan negara melalui pajak. Serta yang terkait pemerataan dan perbaikan kualitas pendidikan serta kesehatan.

Di dalamnya juga terdapat turunan tentang apa-apa saja yang dimaksud dengan grand corruption yang akan menjadi prioritas penanganan.

Yaitu yang berdampak luas pada national interest, melibatkan aparat penegak hukum, melibatkan para pengambil kebijakan, serta yang tergolong kejahatan sindikasi dan terorganisasi Sementara itu, pembangunan integritas nasional lebih bersifat jangka panjang. Dalam hal ini, KPK tidak ingin apa dilakukan hanya berhenti pada penanganan kasus semata, namun juga menyasar program-program pembangunan integritas sehingga menjadi budaya bangsa Indonesia di masa depan.

Roadmap menetapkan apa yang dilakukan bidang pencegahan harus terintegrasi dan simultan dengan bidang penindakan. Penindakan yang dilakukan KPK di suatu instansi harus diikuti dengan pencegahan melalui perbaikan sistem. Demikian juga sebaliknya, penindakan akan masuk saat upaya-upaya pencegahan di fokus area tidak berjalan efektif.

## Penindakan

Di bidang penindakan, KPK bersyukur bahwa melalui proses hukum yang dapat dijamin prudence-nya, KPK meningkatkan status penanganan perkara Century dari penyelidikan ke penyidikan. Kasus yang sungguh menyita perhatian masyarakat luas dan harus diakui telah menggerogoti kepercayaan publik kepada KPK. Kasus-kasus besar lainnya juga terus dikembangkan, seperti kasus Hambalang.

Salah satu kasus besar yang menjadi catatan sejarah dalam pemberantasan korupsi KPK adalah, bahwa pada tahun ini untuk kali pertama KPK menetapkan seorang jenderal polisi aktif dan menteri aktif sebagai tersangka. Tidak kecil hambatan yang harus dihadapi.

KPK juga mulai menerapkan Undang-Undang TPPU pada kasus korupsi yang ditangani sebagai tindak pidana asal. Kasus M. Nazarudin menjadi kasus pertama yang menerapkan UU TPPU, diikuti dengan kasus dana DPID yang dilakukan oleh Wa Ode Nurhayati. KPK juga menerapkan melakukan terobosan dengan penggunaan pasal yang terhitung jarang, yakni Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999, yang diharapkan dapat lebih memberikan efek jera.

Di tahun ini, untuk kali pertamanya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di luar Pulau Jawa, seperti di Riau, bahkan di Buol, Sulawesi Tengah, yang berjarak sekitar tujuh jam perjalanan darat dari Palu, ibu kota Sulawesi Tengah. Hal tersebut menegaskan bahwa jangkauan KPK tak sebatas Pulau Jawa. Selain menjadi terapi kejut, OTT merupakan bentuk respons KPK atas antusiasme masyarakat yang telah melaporkan praktik korupsi.

Secara total, di bidang penindakan, pada tahun ini KPK melakukan 74 kegiatan penyelidikan, 68 penyidikan, dan 60 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan pada tahun sebelumnya. Selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 28 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebanyak 111 miliar rupiah lebih telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan TPK.

Selain penindakan dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; sebagai trigger mechanism, KPK juga secara aktif meningkatkan fungsi koordinasi dan supervisinya. Sebagai bentuk respons atas kejahatan korupsi yang kian sistematis dan canggih, KPK menggandeng aparat penegak hukum menyelenggarakan pelatihan bersama. Selama 2012 telah dilakukan sekurangnya 4 kali pelatihan bersama aparat penegak hukum, yakni di Provinsi Jawa Tengah, Bengkulu, Jambi, dan Kalimantan Timur.

## Pencegahan

Fungsi trigger mechanism dilakukan di sektor pencegahan. Dalam hal ini, KPK melakukan kerja sama koordinasi-supervisi pencegahan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki SDM lebih banyak untuk melakukan koordinasi dan supervisi secara masif di 33 provinsi, yaitu kepada 33 pemprov dan 497 SKPD pemkot/pemkab. Tiga sektor yang menjadi perhatian khusus adalah pelayanan publik, perencanaan dan pengelolaan APBD, dan pengadaan barang dan jasa.

Di tahun ini, KPK juga menggagas dan melaksanakan program "Pilkada Berintegritas". Pilkada DKI Jakarta menjadi pilot project pelaksanaan program pencegahan korupsi melalui pengawasan penyelenggaraan pemilu. Latar belakang program ini adalah karena sistem politik berintegritas merupakan salah satu pondasi dalam terwujudnya sistem integritas nasional dan salah satu momen signifikan dan krusial dalam sistem politik di negeri ini adalah saat dilangsungkannya pemilu/pilkada.

Secara terpisah, KPK juga melakukan berbagai kajian sistem dan tindak lanjut terhadap kajian yang telah dilakukan. Salah satunya di sektor kehutanan yang sistem pengelolaannya masih belum baik, sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar, namun juga berpotensi memicu konflik. KPK mendorong terciptanya solusi dan regulasi tata kelola kawasan hutan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada pemenuhan hak-hak

dasar rakyat selaku pemegang kedaulatan ekonomi. Kajian lainnya adalah menyangkut social cost of corruption serta sektor ketahanan pangan dan ketahanan energi.

---

Di sektor pendidikan, KPK menerbitkan buku “Tunas Integritas”, sebuah buku bacaan yang ramah anak sebagai salah satu media pembelajaran. Dalam seri buku yang terdiri atas enam buku sarat gambar ini, nilai-nilai antikorupsi ditanamkan ke anak-anak melalui beragam cerita yang menyenangkan dan tidak menggurui. Sementara Untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk memberantas korupsi, salah satu caranya adalah melalui pendekatan budaya pop (pop culture) bertema peran keluarga dalam membangun budaya antikorupsi, yaitu dengan pembuatan film layar lebar berjudul “Kita versus Korupsi” atau disingkat “Kvsk”. Film ini diproduksi bekerja sama dengan USAID, MSI, TII, dan Cangkir Kopi. Sejak diluncurkan pada 26 Januari 2012, film ini sudah ditonton melalui screening program dan non-screening program sebanyak hampir 50.000 penonton di seluruh Indonesia dalam kegiatan roadshow di 15 kota.

Secara masif, KPK pada tahun ini mengkampanyekan tagline “Berani Jujur Hebat”, satu dari sembilan nilai dasar antikorupsi yang mencerminkan integritas diri. Serangkaian kegiatan dilakukan di berbagai wilayah dengan mengusung tema ini. Hebatnya, kampanye ini tidak dilakukan KPK sendirian, melainkan juga terdapat keterlibatan banyak elemen. Selain itu, KPK juga coba untuk membangun budaya antikorupsi di dalam keluarga.

## **Kerja Sama Strategis**

Banyak kerja sama strategis dilakukan KPK sepanjang 2012, di antaranya dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perusahaan Penyedia Jasa Telekomunikasi. Semua itu menegaskan bahwa banyak instansi yang punya kepedulian tinggi untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, sekaligus kesepahaman bahwa korupsi haruslah diberantas secara bersama-sama.

Dengan Kemenkumham, beberapa pokok kerja sama strategisnya adalah pendirian rumah tahanan KPK; akses ke link system Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), yang memungkinkan KPK mengakses data perusahaan dan badan hukum dalam kaitannya pemberantasan korupsi; dan link system data perlintasan yang ada di Ditjen Imigrasi. Dengan IDI, kerja sama meliputi di antaranya pemilihan tenaga medis atau dokter untuk menangani sejumlah saksi, tersangka, dan terdakwa saat ditahan oleh KPK dan pemberian second opinion kesehatan para saksi, tersangka, dan terdakwa.

Sebagai kejahatan yang sudah tergolong transnational crime, KPK juga aktif menjalin hubungan dengan luar negeri. Dua hal penting terjadi di tahun ini. Pertama adalah pertemuan SEAPAC yang berisi lembaga antikorupsi se-Asia Tenggara yang menajamkan kebersamaan dan kesepahaman untuk saling bekerja sama. Kedua, pertemuan lembaga antikorupsi sedunia yang menelurkan Jakarta Principle yang berisi 16 prinsip untuk penguatan lembaga antikorupsi.

## **Sumber Daya**

Seluruh kegiatan yang dilakukan KPK pada tahun ini menggunakan anggaran yang berasal dari

APBN. Dari pagu anggaran sebesar 606 miliar rupiah, yang digunakan KPK adalah sebesar 307 miliar rupiah, dengan Pengembalian Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara dan gratifikasi sebesar 113 miliar rupiah.

---

Tahun 2012 ini juga dirasa cukup berat bagi KPK dari segi sumber daya. Kapasitas gedung yang saat ini ditempati KPK tidak mampu lagi menampung tambahan pegawai. Gedung yang ditempati saat ini sudah over capacity, baik dari untuk ruang kerja pegawai, ruang operasional, maupun ruang penyimpanan arsip. Alhamdulillah, bahwa pada akhir tahun ini anggaran pembangunan gedung KPK yang sempat dibintangi akhirnya dicabut. Harapan untuk memiliki gedung sendiri mulai terbuka. Mulai 2013, KPK akan mulai merealisasikan pembangunan gedung yang direncanakan dibangun di atas lahan seluas 8.294 meter persegi yang terletak di Kelurahan Guntur, Setiabudi, seluas 27.600 meter persegi yang terdiri atas 16 lantai dan dapat menampung 1.394 orang pegawai.

Dalam perencanaannya, KPK juga akan membangun rumah tahanan sendiri yang dikelola dan berada di lingkungan gedung KPK. Tidak seperti saat ini, dengan kondisi gedung yang terbatas, kondisi rutan KPK memanfaatkan gudang yang tidak terpakai dan atas kerja sama dengan TNI, dalam hal ini Pomdam Jaya, KPK dapat meminjam pakai Rutan Guntur.

SDM yang dimiliki juga menjadi kendala. Jumlah personel KPK sangat tidak berimbang dengan tugas berat dan cakupannya yang begitu luas yang diemban KPK. Ditambah lagi dengan terus berkurangnya penyidik yang ditarik instansi asal. Di akhir 2011, jumlah SDM KPK adalah 710, dan kini menjadi 674 orang.

Dibandingkan dengan Hong Kong, yang memiliki populasi penduduk hanya tujuh juta jiwa dan luas wilayah tak lebih luas dari Jakarta, ternyata lembaga antikorupsi negeri tersebut didukung oleh 1.200 pegawai. Dari jumlah tersebut, 900 di antaranya merupakan pegawai yang khusus untuk menangani masalah investigasi terkait kasus korupsi. Untuk itu, ke depan penguatan SDM harus tetap dilakukan. Tidak hanya menambah jumlah SDM melalui standar proses rekrutmen yang selama ini berlaku di KPK, namun juga melalui peningkatan kualitas SDM yang ada.

Salah satu komponen SDM yang krusial adalah penyidik yang sangat tergantung kepada instansi lain. Itu sebabnya, pada tahun ini KPK merasa bahwa sudah saatnya mulai melepaskan diri dari ketergantungan tersebut dengan mengangkat penyidik sendiri. Hal ini sudah dilakukan sebagian lembaga antikorupsi di dunia. Mereka sudah keluar dari problem tersebut, karena melakukan perekrutan terhadap penyidiknya sendiri.

Jumlah SDM yang minim memang sungguh dirasa menjadi hambatan terberat. Apalagi, ditambah penarikan penyidik KPK yang berasal dari institusi lain, yang harus diakui memengaruhi kinerja dan mengakibatkan upaya pemberantasan korupsi mengalami pelambatan. Di saat krusial, kehadiran PP 103 tahun 2012 menyelamatkan kondisi darurat pegawai negeri yang dipekerjakan. Masa tugas mereka diperpanjang dari 8 tahun menjadi 10 tahun.

Demi mewujudkan tujuan organisasi KPK yang profesional dan berintegritas, pada 2012 KPK telah melakukan serangkaian kegiatan terkait dengan pemeriksaan bidang keuangan dan

kinerja, yang mencakup reviu terhadap sistem pengendalian untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur, dan tujuan organisasi serta memastikan efisiensi dan efektivitas sumber daya juga melakukan serangkaian tindakan atas pelanggaran yang dilakukan.

Di tahun ini KPK melakukan penegakan etika dan peraturan kepegawaian. Di tahun ini pula telah dilaksanakan sidang Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) terkait pelanggaran etika, yakni sebanyak 6 kasus dugaan pelanggaran berat, dengan hasil putusan pemberhentian dengan tidak hormat sebanyak 2 kasus, pengembalian ke instansi asal sebanyak 1 kasus, skorsing sebanyak 2 kasus; dan surat peringatan ketiga atau terakhir sebanyak 1 kasus.

Di samping itu, berkat upaya keras menjaga akuntabilitas, pada 2012, KPK memperoleh beberapa penghargaan, di antaranya nilai A untuk Akuntabilitas Kinerja KPK oleh KemenPAN dan RB; juara 2 Realisasi Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (IP BMN) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; dan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” dari BPK, predikat yang telah dipertahankan KPK sejak 2008.

Bahwa apa yang telah kami lakukan dan capai pada tahun ini, mungkin masih jauh dari sempurna. Terlebih untuk dalam kejapan mata melenyapkan korupsi dari Indonesia. Meski demikian, kami yakinkan, diri kami sendiri, dan masyarakat sekalian, bahwa KPK tetap konsisten dan sungguh-sungguh dalam menjalankan amanat ini. Sekaligus mengajak semua pihak untuk bersama, bersatu dalam satu barisan rapat demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

## **PIMPINAN KPK**